

WIKILEAKS DAN AGENDA SETTING MEDIA

Retno Manuhoro Setyowati

(retno@ftik.usm.ac.id)

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang

Abstract

Wikileaks frenetic appearance as a hacker organization state documents and other important information becomes a new phenomenon of life in the current global communication. Certainly, the phenomenon is also not missed the attention of the mass media worldwide, including in Indonesia. Through this case appeared a few thoughts about the position of a topic that could affect the media policy. Through agenda setting theory, obtained a description of the effects of issues on the media agenda, public agenda and policy agenda.

Keywords: *wikileaks, agenda setting, political economic media, teori normative media.*

PENDAHULUAN

Wikileaks adalah sebuah organisasi internasional, bermarkas di Swedia yang didirikan pada tahun 2006. Situsnya mengkhususkan diri pada publikasi dokumen-dokumen rahasia di seluruh dunia. Beberapa media *online* menyebutkan *Wikileaks* didirikan oleh sejumlah politikus, ilmuwan, dan wartawan. Nama *Wikileaks* ini tidak ada hubungan sama sekali dengan situs lainnya yang hampir mirip namanya yaitu *Wikipedia*. *Wikileaks* dipimpin oleh Julian Assange, seorang jurnalis yang juga aktivis internet dari Australia. *Wikileaks* menerima bahan-bahan rahasia, yang disensor, atau yang bukan untuk khlayak umum yang bermuatan politik, diplomatik, maupun etik.

Situs *Wikileaks* membangun sistemnya sendiri. Setiap data yang masuk otomatis terenkripsi dan langsung anonim. Orang dalam *Wikileaks* pun tidak tahu identitas si pengirim bocoran. Hanya dalam kurun waktu empat tahun sejak diluncurkan, situs peniup peluit (*whistle blower*) *Wikileaks* menjadi sangat terkenal. Gerakan terbarunya adalah membocorkan lebih dari 250.000 dokumen kawat

diplomatik Amerika Serikat yang membuat kehebohan pemimpin negara yang bersangkutan juga pemimpin negara-negara lain.

Wikileaks membocorkan ribuan dokumen yang dikirimkan kepada sejumlah grup media. Informasi ini membocorkan kebijakan para pemimpin dunia serta informasi sensitif mengenai terorisme dan proliferasi nuklir dari diplomat AS. Hampir semua informasi tentang kegiatan diplomatik AS terhadap negara-negara lain disuguhkan oleh situs ini. Mulai dari hubungan dengan negara-negara sekutu hingga berita dalam taraf "berita tidak penting" seperti kebiasaan Raja-raja Arab yang senang berpesta. *Wikileaks* juga menginformasikan dokumen-dokumen pemerintah AS terutama pandangan pribadi diplomatnya. Ungkapan-ungkapan yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh publik, menjadi terbuka akibat bocoran kawat diplomatik tersebut. Ini menjadi semacam diplomasi "penghinaan" terhadap negara-negara di luar AS. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad disamakan dengan Hitler, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy disebut sebagai Kaisar Tanpa busana, Presiden

Afganistan Hamid Karzai disebut sebagai karakter paranoid, dan Kanselir Jerman Angela Merkel sebagai politisi teflon.

Kehebohan terus terjadi seiring dengan bocoran dokumen, yang menggiring publik membaca fenomena ini sebagai bagaimana negara adidaya memperlakukan negara lain, sekaligus wajah asli negara Barat yang ternyata anti kebebasan informasi dan demokrasi. Citra AS selama ini yang dikumandangkan sebagai negara pro demokrasi dan menjunjung tinggi kebebasan informasi langsung runtuh seiring dengan reaksi para pemimpinnya yang menuduh *Wikileaks* sebagai situs “pembunuh”. Selain Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton yang menyatakan sebagai situs yang membahayakan nyawa orang lain, *Wikileaks* juga menerima tuduhan dari komentator politik terkenal AS, Glenn Beck yang meyakini keterkaitan Assange dengan hartawan dunia George Soros. Beck menduga, hubungan keduanya dilandasi dari teori konspirasi yang ingin mengacaukan dunia sehingga berpengaruh pada segala aspek.

PEMBAHASAN (WIKILEAKS DAN AGENDA SETTING)

Akibat pengiriman bocoran kabel diplomatik ke sejumlah media di hampir seluruh dunia, media massa kemudian menempatkan isu *Wikileaks* sebagai isi media yang tidak boleh ditinggalkan. Sepanjang rentang waktu akhir tahun 2010, media massa terus menerus memberitakan hingar bingar kasus *Wikileaks*. Seperti misalnya yang terjadi di Timur Tengah dan juga media massa di belahan dunia yang lain saat ini sedang ramai membicarakan bocoran dokumen rahasia mengenai isu nuklir Iran, pencucian uang, sumber dana terorisme dan masalah lainnya. *Al Jazeera*, televisi terkemuka di Timur tengah bahkan hampir setiap hari mengulas isu tersebut, dan hampir semua media cetak menulis

hal tersebut sebagai berita utama. Di Inggris, Harian *The Guardian* secara kontinyu menulis perkembangan bocoran tentang keterlibatan pejabat tinggi beberapa negara di Afrika Barat dalam penyelundupan narkotik yang menghambat operasi penumpasan jalur distribusi narkotik dunia oleh Inggris dan Amerika Serikat. Di Indonesia, negara yang hingga kini masih dalam taraf “aman” dari pembocoran kawat diplomatiknya – media massanya juga menempatkan isu *Wikileaks* sebagai agenda berita. Harian *Kompas* cetak secara konsisten, sejak tanggal 30 November 2010 hingga hari ini selalu menulis tentang perkembangan berita *Wikileaks*. Situs-situs berita di Indonesia juga selalu meng-*up date* perkembangan bocoran dari hari ke hari. Singkatnya, kepentingan tiap-tiap negara itulah yang mendorong media massa menempatkan isu *Wikileaks* sebagai *agenda media*. Asumsi teori *Agenda Setting* adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar bukan dengan perubahan sikap dan pendapat. Mc Combs dan Shaw (1977) menyatakan bahwa khalayak tidak hanya mempelajari isu publik dan berbagai hal lainnya yang diberitakan di media, namun juga mempelajari seberapa penting sebuah isu atau topik berdasarkan penekanan yang diberikan media terhadap topik-topik tersebut. Setelah melewati lebih dari satu dekade, Rogers dan Dearing (1988) memberikan sebuah pernyataan yang menjelaskan proses penyusunan agenda yang berbeda-beda dan memberikan kesimpulan yang lebih *definitive* tentang jumlah dan bentuk efek yang mungkin

muncul. Selanjutnya Roger dan dearing membedakannya menjadi tiga (3) bentuk agenda:

1. Agenda media/*media agenda*, yang merujuk pada prioritas perhatian dalam isi media terhadap isu dan peristiwa.
2. Agenda publik/*public agenda*, merujuk pada berbagai penonjolan isu dalam opini publik dan pengetahuan.
3. Agenda kebijakan/*policy agenda*, menjelaskan isu dan proposal kebijakan dari para politisi.

Harian *Republika* cetak dan *online*, pada edisi akhir tahun 21010 menulis bocoran kawat diplomatik tentang Indonesia, yang diduga berasal dari Kedubes AS di Cina, yang menyatakan Cina cukup senang dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam dokumen itu dijabarkan bahwa Amerika Serikat menerima kondisi jika Cina bisa memengaruhi kondisi umum pembangunan di Indonesia. Beijing harus sensitif terhadap realitas politik kekuatan etnis Cina di Indonesia. Meski demikian sampai saat ini media agenda, masih belum menimbulkan proposal kebijakan dari Pemerintah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya *agenda setting* oleh media massa bisa membuat agenda kebijakan, karena agenda publik yang kurang mendukung. Khalayak masih menganggap bahwa berita *Wikileaks* tentang Indonesia dipandang masih belum memengaruhi kehidupan bernegara, sehingga para pemimpin tidak bereaksi dengan cepat. Dalam berita Harian *Republika* pula disebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga enggan menanggapi kemungkinan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat.

Mengingat bahwa *agenda-setting* berada pada domain dengan asumsi *powerful media effect*, maka sebenarnya efek media terhadap khalayak memang

besar. Hanya saja hal ini tidak serta merta demikian. Ada faktor-faktor yang mengekskalasi tingkat kekuatan pengaruh *agenda-setting*. Di antaranya adalah langsung atau tidak langsung jenis pengalaman terhadap isu yang sedang diagendakan, tingkat *need for orientation* yang ada pada khalayak, tingkat pendidikan serta tingkat kredibilitas media yang melakukan setting terhadap agenda tertentu. Pada tanggal 13 Desember 2010, harian *Kompas* cetak menempatkan kasus *wikileaks* sebagai *head line* dengan judul "Wikileaks Jadi Pelajaran", namun hal ini tidak pula membuat adanya perubahan tindakan/kebijakan publik yang dibuat kecuali imbauan dari Presiden RI yang meminta agar kasus ini menjadi pelajaran tentang etika diplomat untuk menghindari penyogokan dan penekanan.

PENUTUP

Sejalan dengan apa yang disampaikan McLuhan, bahwa dengan perkembangan teknologi informasi maka akan muncul *global village*, dimana terjadi "desa dunia", saat dimana jarak bukan menjadi hambatan lagi bagi umat manusia untuk saling berkirin informasi. Dan kehadiran kasus *Wikileaks* via internet menjadi sarana terwujud nyatanya *global village* tersebut. Hampir diseluruh dunia sedang kegerahan akibat kebocoran kawat-kawat diplomatik Julian Assange, jurnalis pemimpin situs itu memperkerjakan wartawannya untuk menggali berita lewat teknik investigasi untuk melengkapi bocoran kawat-kawat diplomatik yang masuk ke situsnya. Kerja Julian dan kawan-kawannya banyak dicerca sebagai kerja jurnalistik yang tidak bertanggung jawab, dan mereka menerima tuduhan dari para pemimpin AS sebagai pers pencabut nyawa. Dari perspektif Hillary Clinton Menlu AS, *Wikileaks* tak ubahnya monster yang menjual negaranya sendiri, yang menjadikan berita sebagai barang dagangan yang laku dijual di media

manapun karena *Wikileaks* mengirimkan kabel-kabel rahasia diplomatik dari beberapa negara itu kepada media massa pilihan di seluruh dunia.

Tuduhan adanya konspirasi untuk mendestabilkan dunia, terkait dengan teori *political economic media* karena dampak yang dirasakan langsung terjadi *polarized communication*, konflik komunikasi yang terbelah menjadi sebuah komunikasi dalam kutub "kita" dan "mereka". Kasus ini menggurita sedemikian luas, karena negara-negara yang tersangkut dalam berita rahasia itu mengecam Amerika dalam menerapkan keamanan kabel-kabel diplomatiknya. Dengan logis, maka secara langsung ini menunjukkan bahwa setiap negara yang tersangkut tidak menolak fakta yang disebar oleh *Wikileaks*. Negara-negara mitra AS pun ikut merasa terancam stabilitas negaranya karena niat-nita terselubungnya diketahui dengan gamblang oleh publik. Ketakutan ini wajar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Bertalanffy dalam teori sistem umum bahwa ketika terdapat sebuah gangguan pada salah satu bagian sistem, maka hal ini akan memengaruhi keseluruhan sistem. Terdapat pola interaksi yang kompleks diantara bagian-bagian sistem. Saling keterhubungan yang ada dalam unit kerjasama internasional inilah yang dikhawatirkan para pemimpin dunia akan menimbulkan dampak besar. Bagi Amerika Serikat, ini merupakan kasus besar yang menjadi musibah, karena lewat *Wikileaks* borok-borok Amerika ikut terkuak.

Wikileaks mengungkap penyuaipan, pembunuhan, kejahatan perang, peredaran narkotik dan segala keburukan AS. Namun di sisi lain, kerja Julian Assange dan kawan-kawan ini tetap mendapatkan dukungan dari kalangan yang menginginkan keterbukaan Amerika. Julian Assange pun berbicara bahwa motto atas pekerjaannya adalah membersihkan dunia dari pemerintahan

yang korup. Dari *Wikileaks* kita melihat AS telah melanggar aturan mereka sendiri yakni *Foreign Corrupt Practices Act*. Ini adalah aturan yang melarang korporasi AS menyuaip di negara-negara asing, di lokasi mereka berbisnis. Julian rupanya menerapkan teori pers tanggung jawab sosial, sebuah teori *normative media*. Theodore Peterson mengatakan bahwa teori tanggung jawab sosial mendasarkan pada pandangannya kepada suatu prinsip bahwa kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban, dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern seperti sekarang.

Beberapa pokok pikiran pers tanggung jawab sosial diantaranya adalah pers seyogyanya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat. Kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, obyektivitas, dan keseimbangan. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, pers seyogyanya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. Pers sebaiknya juga menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama. Assange membuang jauh-jauh kerahasiaan sebuah dokumen, karena baginya itu tidak sejalan dengan pemikiran pers yang bertanggung jawab, yang menginginkan perubahan dunia menjadi lebih baik. Bagi AS bisa saja kasus ini menjadi musibah, namun bagi negara-negara lain ini menjadi *early warning system* dimana media menjalankan fungsinya sebagai sebuah sistem peringatan dini yang memberi wacana bagi para pemimpin dunia di luar AS (termasuk Indonesia)

untuk mengatur strategi hubungan internasionalnya. Pidato Barack Obama beberapa waktu yang lalu, seolah terjawab secara tidak langsung lewat kasus *Wikileaks*, bahwa perubahan yang dijanjikannya pada masa kampanye mulai nyata, meski terasa pahit.

Pada era *New Media* yang menekankan jaringan/*network*, sebagaimana dikemukakan George Gebner, kasus *Wikileaks* setidaknya dapat kembali menempatkan media massa pada posisi yang tidak hanya mentransmisikan informasi, namun juga dapat mengkonstruksikan agenda. Media komunikasi modern memungkinkan berjuta-juta orang tidak terpisahkan jarak dan waktu, sehingga media massa memiliki kemampuan menciptakan publik, mendefinisikan isu, dan memberikan kerangka referensi bersama.

Daftar Pustaka

- Edi Santoso. 2010. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- F. Rachmadi. 1990. *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: Grapers.
- Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss. 2005. *Theories of Human Communication* (Eight Edition). USA: Thomas Wadsworth.
- McQuail, Dennis. 2009. *Mass Communication Theory* (Six Edition). New York: Sage.
- West, Richard & Lynn H. Turner. 2007. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application* (Third Edition). Jakarta: Salemba Humanika.
- Harian KOMPAS. Edisi 30 November – 19 Desember 2010.
- www.republika.co.id; Diakses pada 12 Desember 2010.